# **UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik

MAKALAH

# **TURBULENSI POLITIK tahun 2022**

Dosen Pengampu:

Dr (C). Diana Mayasari, S.Kom., M.T., M.Si



Disusun oleh:

Rida Parida

21012210

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
BANDUNG

2021

**KATA PENGANTAR** 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang

berjudul "Turbulensi Politik tahun 2022" tepat pada waktunya. Makalah

disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Ilmu

Politik. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan

tentang turbulensi politik tahun 2022 bagi para pembaca dan juga bagi

penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari

segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk

kesempurnaan makalah ini.

Bandung, 19 Januari 2022

Penulis

i

## **DAFTAR ISI**

KATA PE	NGANTARi
DAFTAR	ISI ii
BABIPE	NDAHULUAN 1
	tar Belakang Masalah
	juan Makalah2 ınfaat Makalah2
BAB II KA	JIAN PUSTAKA3
A. Tu	rbulensi3
В. Ро	litik3
1.	Pengertian Politik
2.	Fungsi Politik3
3.	Tujuan Politik6
4.	Peranan Politik6
5.	Perkembangan Politk
BAB III P	EMBAHASAN11
BAB IV P	ENUTUP13
DAFTAR	DIISTAKA 14

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan pilar utama penyelenggaraan negara guna mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Dalam berdemokrasi diperlukan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang disebut sebagai politik. Istilah politik mempunyai banyak sekali makna tergantung dari sudut pandang mana politik diartikan. jika politik diartikan dari sudut pandang orang-orang yang berkecimpung langsung ke dalam politik maka politik itu merupakan sebuah makanan pokok bagi mereka yang disantap setiap harinya, begitupun sebaliknya.

Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini di pengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.

Cuaca politik kali ini tidak terlalu baik, kekuatan politik nasional yang direpresentasikan melalui partai politik mengentalkan perbedaan melalui skema koalisi yang mengerucut pada dua kutub yang berbeda, meski slogan Indonesia Hebat serta Merah Putih merujuk pada kepentingan secara umum, namun aspirasi kanal politik via koalisi memiliki tendensi berbeda sesuai kepentingan kelompok elit, yang terpisah dari kehendak publik. Kondisi kepemimpinan baru yang akan segera dilantik masih berada dalam kepungan turbulensi politik, yang secara langsung mengguncang sistem yang sudah dirancang bangun bagi penyelenggaraan pemerintahan mendatang.

## B. Rumusan Masalah

- 1. Apa yang dimaksud dengan turbulensi politik?
- 2. Turbulensi politik apa yang sedang terjadi di Indonesia?

# C. Tujuan Makalah

- 1. Mendeskripsikan pengertian turbulensi politik dan memaparkan unsur-unsur dalam politik.
- 2. Memaparkan bagaimana turbulensi politik yang terjadi di Indonesia saat ini.

### D. Manfaat Makalah

- 1. Melatih penulis agar mampu meyusun tulisan ilmiah yang benar.
- 2. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya.

#### BAB II

#### **KAJIAN PUSTAKA**

#### A. Turbulensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), turbulensi adalah gerak bergolak tidak teratur yang merupakan ciri gerak zat alir.

#### B. Politik

#### 1. Pengertian Politik

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat.

#### 2. Fungsi Politik

Politik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

#### a. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.

Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi Politik, terdapat dua hal yang penting, yaitu Sosialisasi Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia

mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis.

Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud : interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu suatu ideologi.

### b. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap memiliki sistem atau sistem politik prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

## c. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya.

Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.

#### d. Fungsi Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah demensi vertical dari struktur social masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertical dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup.

Soerjono Soekanto (1981:133),menyatakan social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau system berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi, dalam artian kita tidak akan menemukan masyararakat seperti kue lapis; tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan

secara vertical menjadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah berdasarkan criteria tertentu.

#### 3. Tujuan Politik

Berikut ini terdapat beberapa tujuan politik, terdiri atas:

- Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum.
- b. Adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis.
- c. Adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
- e. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara.
- f. Menjaga keamanan dan perdamaian negara.
- g. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa.

#### 4. Peranan Politik

Peranan politik terdiri atas:

a. Fungsi perumusan kepentingan

Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Orang per orang atau kelompok-kelompok dalam sayarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, atau apa yang ingin mereka dapatkan dari negara/politik. Fungsi ini seharusnya terutama dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok-kelompok kepentingan.

### b. Fungsi pemaduan kepentingan

Fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang paling bertanggungjawab untuk memadukan kepentingan adalah partai politik. Namun demikian, proses pemaduan kepentingan juga terjadi di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.

### c. Fungsi pembuatan kebijakan umum

Fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Pelaku fungsi ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif (pembuatan undang-undang) atau lembaga eksekutif sendiri (pembuatan peraturan pemerintah).

### d. Fungsi penerapan kebijakan

Fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksana kebijakan pemerintah adalah aparat birokrasi pemerintah di bawah pimpinan pejabat eksekutif.

#### e. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan

Fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku peran untuk mengadili adalah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

### 5. Perkembangan Politik

### a. Perkembangan Politik Era Presiden Soekarno

Sebagai pemimpin besar revolusi, Soekarno dipandang sebagai Presiden Republik Indonesia yang punya kharisma politik tersendiri. Lugas, tegas, menggebu-gebu, semangat, dan cenderung anti-barat merupakan gambaran yang bisa kita saksikan pada setiap pidato politiknya. Masa awal kepemimpinannya, ditandai dengan terbentuknya sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini menciptakan sebuah pemerintahan yang memberi kekuasaan dominan kepada lembaga legislatif. Terbentuknya berbagai partai politik yang bebas menyuarakan aspirasi merupakan tanda kehidupan politik terakomodir.

Perkembangan politik di era kepemimpinan Soekarno, telah memberikan ruang luas bagi partai politik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya. Ini terbukti dengan terbentuknya sistem kepartaian (multipartai). Masyarakat pun memiliki pilihan yang banyak untuk menempatkan keterwakilan politiknya di parlemen. Pemilu sebagai ciri dari negara demokrastis, di era Soekarno diselenggarakan dengan baik. Kebebasan pers menduduki posisi tertinggi, sebagai media informasi yang dijamin kebebasannya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Era kepemimpinan kemudian ditandai dengan melemahnya sistem kepartaian yang bebas. Lalu terjadi gerakan perkembangan yang lambat terhadap perkembangan politik Indonesia saat itu.

### b. Perkembangan Politik Era Presiden Soeharto

Perkembangan politik Indonesia era kepemimpinan Presiden Soeharto di mulai ketika ia "mengambil alih" kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pemerintahan politik dijalani berdasarkan asas Pancasila, yang juga mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya, realisasi pengamalan Pancasila mampu diterima masyarakat sebagi "kiblat" pemerintahan politik yang dijalankan Soeharto. Namun, berubah sebagai alat pemaksaan kehendak, yang

mengubah sistem pemerintahan menjadi otoriter. Presiden menjadi komandan pemerintahan yang tidak boleh tersentuh oleh apapun dan siapapun. Kehidupan politik yang diharapkan mengalami perkembangan setelah runtuhnya rezim Soekarno ternyata hanya jadi retorika semata.

Posisi politik lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, malah menjadi tameng dari pemerintah yang dibangun secara over sentralistik. Rotasi kekuasaan politik tak pernah terjadi hingga 32 tahun lamanya. Pemilu hanya dijadikan rutinitas lima tahunan yang pemenangnya sudah bisa ditebak. Partai Golkar menjadi kendaraan politik yang ampuh digunakan oleh Soeharto untuk mengamankan setiap keputusan politik pemerintahannya di DPR. Bahkan, Presiden Soeharto berubah sangat arogan, dengan menggunakan kekuatan militer pada setiap situasi keamanan yang bisa saja mendorong masyarakat untuk bergerak melawan rezimnya yang korup.

#### c. Perkembangan Politik Era Reformasi

Tidak ada yang dapat memberikan penilaian dengan pasti apakah cita-cita reformasi sudah terwujud atau belum. Runtuhnya kekuasaan Soeharto padahal telah memberikan secercah harapan bagi terciptanya iklim demokrasi yang jauh lebih baik. Namun, harapan itu kenyataan hanya menjadi mimpi tanpa realisasi nyata. Masih adanya perbedaan dalam pandangan ketegasan terhadap sistem pemerintahan, merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat. Di sini terlihat ada persaingan politik yang terjadi, antara pemerintah dan legislatif sebagai pembuat produk undang-undang.

Kekuasaan presiden tidak mutlak dijalankan secara penuh, tapi terpengaruh pada parlemen. Hal ini akhirnya menciptakan situasi politik yang tidak sehat, karena presiden terpaku oleh kepentingan lain. Kepentingan itu bisa jadi tidak berpengaruh pada perbaikan kondisi bangsa secara keseluruhan. Dari uraian tadi, jelas terlihat bahwa sistem demokrasi dalam perkembangan politik Indonesia yang dibangun pasca Orde Baru masih mencari bentuk yang ideal. Satu prestasi yang patut kita cermati adalah keinginan yang kuat untuk merealisasikan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Kebebasan berserikat dan berpendapat yang ada dalam undang-undang dasar direalisasikan dengan sistem multipartai.

#### BAB II

#### **PEMBAHASAN**

Cuaca politik kali ini tidak terlalu baik, kekuatan politik nasional yang direpresentasikan melalui partai politik mengentalkan perbedaan melalui skema koalisi yang mengerucut pada dua kutub yang berbeda, meski slogan Indonesia Hebat serta Merah Putih merujuk pada kepentingan secara umum, namun aspirasi kanal politik via koalisi memiliki tendensi berbeda sesuai kepentingan kelompok elit, yang terpisah dari kehendak publik. Kondisi kepemimpinan baru yang akan segera dilantik masih berada dalam kepungan turbulensi politik, yang secara langsung mengguncang sistem yang sudah dirancang bangun bagi penyelenggaraan pemerintahan mendatang.

Turbulensi politik bakal terjadi karena banyak menteri dalam kabinet yang berasal dari partai politik. Akan terjadi konflik kepentingan antara menteri yang merupakan perwakilan partai politik tersebut dengan tahapan pemilu berikutnya. Sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tantang Pemilihan Umum bahwa tahapan Pilpres 2024 dan tahapan Pemilu Legislatif 2024 pencoblosannya adalah bulan Maret 2024. Sedangkan tahapan pemilu tersebut sudah dimulai 20 bulan sebelum pencooblosan, berarti Juli 2022 telah memasuki tahapan pemilu, baik pilpres maupun pileg.

Beberapa anggota kabinet terindikasi punya misi politik di Pilpres 2024. Mereka rawan melakukan upaya penggalangan dana melalui kewenangan yang melekat pada dirinya, untuk kepentingan pribadi. Permasalahan lain yang dihadapi kabinet Jokowi saat ini adalah krisis ekonomi. Sejak 2020 APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target, terjadi perubahan parsial ke arah negatif. Di APBN terjadi pengurangan dana perimbangan (bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer daerah berkurang). Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan

seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor. Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan pilar utama penyelenggaraan negara guna mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Dalam berdemokrasi diperlukan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang disebut sebagai politik. Pada tahun ini terdapat beberapa turbulensi politik yang terjadi karena permasalahan beberapa kabinet.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. 2022. "Turbulensi", <a href="https://www.kbbi.web.id/">https://www.kbbi.web.id/</a>, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 19.00. Prawiro, Muhammad. 2020. "Pengertian Politik: Tujuan, Jenis, dan Beberapa Sistem Politik di Dunia",

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 19.05.

Dahono, Yudo. 2021. "2022, Waspadai Turbulensi Politik Kabinet Jokowi", <a href="https://www.beritasatu.com/politik/764697/2022-waspadai-turbulensi-politik-kabinet-jokowi">https://www.beritasatu.com/politik/764697/2022-waspadai-turbulensi-politik-kabinet-jokowi</a>, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 19.43.